



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PIDIE
TAHUN 2023-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan rahmatNya kita telah dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2023-2026 dan Shalawat beserta salam kita sanjungkan keharibaan Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang terang benderang.

Renstra ini disusun sebagai dasar untuk Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie secara bertahap selama 5 (lima) tahun 2023-2026 agar Pembangunan Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Hubungan Industrial. Lebih terarah dan berkesinambungan sebagai bahagian penting dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai mana diamanahkan dalam Impres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Demikian semoga Renstra ini dapat memberikan pedoman bagi setiap bidang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie. Penyusunan Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan, maka mohon saran dan kritikan yang membangun untuk kebaikan dan kesempurnaan penyusunan Renstra.

Terakhir harapan kami semoga penyusunan Renstra ini bermanfaat bagi kita semua.

Amien Yaa Rabbal'alamin.

Sigli, Mei 2022
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PIDIE

H. ISNAINI, ST,M.Si
Pembina TK.I
Nip. 19761230 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
B A B II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	5
2.2. Sumber daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie	10
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie	12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie	12
B A B III PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie	14
3.2. Telaah Renstra K/L dan Renstra	15
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	16
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	17
B A B IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie.....	19
B A B V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	20
B A B VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 21	
B A B VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	23
B A B VIII PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Hubungan Industrial merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan pemerataan penduduk serta pembukaan daerah terisolir sebagai modal pengembangan dan pembangunan Daerah maupun Nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang - undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang - undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi.

Permasalahan Kesejahteraan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Pidie mengenai kesempatan kerja yang belum merata. Sedangkan Permasalahan Transmigrasi masih kurangnya Sarana dan Prasarana di wilayah transmigrasi dan kurang Pembinaan warga Transmigrasi.

Pembangunan Bidang Tenaga Kerja dititik beratkan pada pola Pemberdayaan sumber daya manusia dan perberdayaan ekonomi, baik individu, kelompok maupun Lembaga yang mampu melaksanakan Tugas dan Kewajibannya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya yang lebih baik dan mampu berperan dalam Pembangunan Daerah maupun Nasional.

Sedangkan Pembangunan Bidang Transmigrasi yang merupakan urusan Pilihan dititik beratkan pada Pembangunan Sarana dan Prasarana serta pemberdayaan warga transmigrasi disamping pembukaan lokasi transmigrasi baru.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan Pembangunan dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Hubungan Industrial. Untuk terlaksananya tugas dan wewenang tersebut perlu adanya perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan agar pembangunan tersebut dapat terarah dan berkesinambungan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin yang timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan dimasa depan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Tahun 2023 - 2026 berpedomani pada RPJM Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun 2023 - 2026 dengan mangacu pada Visi dan Misi Bupati Terpilih.

Renstra SKPK sangat dekat hubungannya dengan dokumen perencanaan yang tersedia. Dokumen perencanaan termasuk evaluasi hasil monitoring setiap kegiatan pelaksanaan, keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

1.2. Landasan Hukum

- 1.2.1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 1.2.2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 1.2.3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 1.2.4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 1.2.5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 1.2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1.2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 1.2.8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 1.2.9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 1.2.10 Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi ;
- 1.2.11 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 1.2.12 .Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
- 1.2.13 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie;
- 1.2.14 Peraturan Bupati Pidie Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Tahun 2023 - 2026 disusun dengan maksud dan tujuan adalah menyediakan Dokumen Perencanaan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie untuk kurun waktu tahun 2023 - 2026 dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pidie.
- b. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk kurun waktu tahun 2018 - 2022.
- c. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie beserta unit kerjanya dalam Pembangunan Kesejahteraan Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Hubungan Industrial Kabupaten Pidie yang terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

1.4. Sistematika

Agar lebih terfokus dan terarahnya Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka sistematika penyusunan Renstra sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategi dan penentuan isu-isu strategi/

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini di kemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini membahas tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Oooooooooo OOOooooooooo

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPK

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie merupakan satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah dan instansi Teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor : 5 Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie.

Untuk melaksanakan Kewenangan dan Tugas Pokok tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Organisasi dan Ketatalaksanaan Dinas.
- b. Penyusunan Program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
- c. Penyusunan Program Kebijakan Teknis dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Hubungan Industrial.
- d. Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Hubungan Industrial.
- e. Pelaksanaan Pembinaan Operasional dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Hubungan Industrial sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Hubungan Industrial.
- h. Pembinaan UPTD.
- i. Pelaksanaan Tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan Tugas melaksanakan tugas umum Pemerintah dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Hubungan Industrial sesuai dengan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Hubungan Industrial.
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan Program dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Hubungan Industrial.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Hubungan Industrial.
- d. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
- e. Penyusunan program dan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Hubungan Industrial.
- f. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Hubungan Industrial.
- g. Pelaksanaan Pembinaan Operasional dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- i. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi perencanaan, Pendataan, Kepegawaian, Keuangan, peralatan, organisasi dan ketatalaksanaan.
- j. Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Hubungan Industrial.
- k. Pembinaan UPTD dan.
- l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang dan tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretaris adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang Pelayanan dan pengelolaan administrasi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, keuangan, Perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan.
- b. Penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala.
- c. Penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.

- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan bidang-bidang serta unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan.
- f. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas.
- g. Penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat.
- h. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Sekretaris dibantu oleh sub Bagian yang terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, arsip, standarisasi ketatalaksanaan, hukum, kehumasan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian.

b. Sub Bagian Data dan Penyusunan Program

Sub Bagian Data dan Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan tugas melakukan Pengumpulan data, Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja dinas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan, rencana kebutuhan dinas, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan asset daerah.

3. Bidang Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan SDM dan Produktivitas Tenaga Kerja.

a. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja

Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas dan melakukan pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja.

b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Produktivitas Tenaga Kerja, Pemagangan dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Mempunyai tugas dan melakukan pelatihan tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas, penempatan dan pemagangan tenaga kerja.

4. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)

Mempunyai tugas dan melakukan perumusan kebijakan teknis hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

a. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial

Mempunyai tugas dan melakukan pembinaan kelembagaan hubungan industrial.

b. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Mempunyai tugas dan melakukan pencegahan dan mediasi penyelesaian kasus hubungan industrial serta perumusan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja.

5. Bidang Transmigrasi

Mempunyai tugas dan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan pemukiman transmigrasi.

a. Seksi Pembangunan Pemukiman Transmigrasi

Mempunyai tugas dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan di bidang penyiapan dan pembangunan pemukiman, sarana dan prasarana permukiman, serta kelayakan pemukiman.

b. Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Mempunyai tugas dan penyiapan perumusan dan pelaksanaan di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, fasilitasi penetapan kawasan.

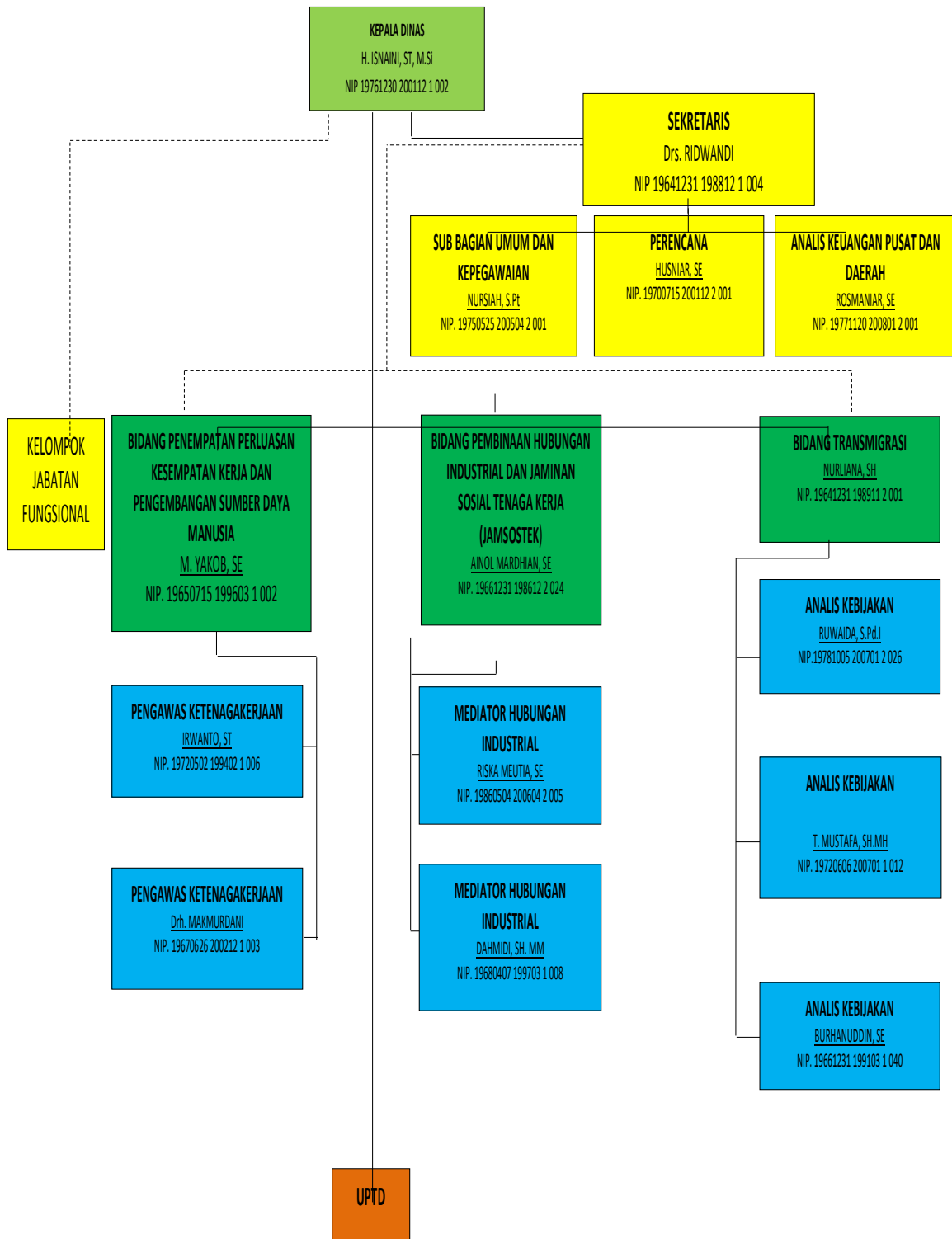
c. Seksi Persebaran Penduduk

Mempunyai tugas dan penyiapan pelaksanaan di bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigrasi dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan serta penataan dan adaptasi.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur Pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan, pembinaan dan Rehabilitasi teknis Bagi Penyandang masalah kesejahteraan Sosial yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA CARA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PIDIE



5	D3	1 orang
6	D2	- orang
7	D1	- orang
8	SMA sederajat	5 orang
9	SMP sederajat	- orang
10	SD sederajat	- orang
11	Tidak sekolah	- orang
Jumlah		22 orang

2.2.2. Aset / Modal

Aset tetap merupakan investasi jangka panjang. Aset mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang signifikan bila dibandingkan dengan komponen lainnya. Pengertian aset dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat aset tetap yang dimiliki meskipun digunakan oleh orang lain.

Aset tetap digunakan untuk kegiatan operasional Dinas. Aset tetap disatu sisi merupakan sumberdaya ekonomi, disisi lain merupakan suatu komitmen, artinya di kemudian hari Dinas wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberikan manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu, produksi, atau peningkatan standar kinerja. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh pada nilai tetap yang bersangkutan. Sedangkan pengeluaran yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja merupakan belanja modal harus dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap tersebut.

2.2.3. Unit Usaha yang Masih Operasional

Unit usaha adalah suatu tempat melakukan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil berupa keuntungan berupa upah atau laba usaha. Di Kabupaten Pidie terdapat beberapa unit usaha yang masih beroperasi di beberapa daerah diantaranya sebagai berikut :

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie

Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Hubungan Industrial yang diberikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja.
- b. Pembinaan dan Perlindungan lembaga tenaga kerja.
- c. Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja.
- d. Penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
- e. Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
- f. Pembinaan warga Transmigrasi.
- g. Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie

Analisis Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie baik internal maupun eksternal adalah sebagai berikut :

A. Analisis Lingkungan Internal

1. Kemampuan

- a. Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Sarana dan Prasarana (Peralatan dan Inventaris Kantor).
- c. Anggaran (Pembiayaan).
- d. Komitmen Pimpinan dan Pegawai dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya.
- e. Adanya Konsep Perencanaan Awal.
- f. Adanya Konsep Perencanaan Teknis yang Baik.

2. Kelemahan

- a. Kurangnya tenaga pegawai yang memiliki kompetensi dibidang Pelayanan Tenaga Kerja, Pelayanan kawasan transmigrasi dan Pelayanan Hubungan Industrial.
- b. Kurangnya sarana dan Prasarana pendukung untuk lancarnya operasional kegiatan.
- c. Belum memadai Fasilitas Gedung Kantor yang dapat menghambat Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- d. Masih kurangnya Anggaran untuk Tenaga kerja, Transmigrasi dan Hubungan Industrial.
- e. Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- f. Belum tersedianya sarana dan prasarana pada Gedung Pembinaan dan Pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.

B. Analisis Lingkungan Eksternal

1. Peluang

- a. Adanya dukungan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- b. Undang - undang Nomor 33 tahun 2004 tentang-tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah.
- c. Undang – undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Daerah.

- d. Adanya dukungan dan komitmen DPRK untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Hubungan Industrial.
- e. Tersedianya sumber daya alam yang mendukung pemberdayaan Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Hubungan Industrial.

2. Tantangan

- a. Keterbatasan anggaran untuk bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Hubungan Industrial maka banyaknya Program dan Kegiatan belum dapat dilaksanakan.
- b. Tingginya pertumbuhan pencari kerja setiap tahun tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja yang tersedia.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana maka pembinaan tenaga kerja belum dapat dilaksanakan secara optimal untuk meningkat kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
- d. Belum optimalnya pembangunan dan pemanfaatan wilayah tertinggal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi daerah.

oooooooooOOoooooooo

\

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Analisa isu - isu strategis merupakan hal atau bagian yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam mendukung pembangunan ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan hubungan industrial. Perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk menyesuaikan dengan keadaan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan sehingga perhatian kepada masyarakat dan lingkungan, eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan eksistensi institusi/organisasi untuk jangka panjang.

Isu strategis bagi SKPK diperoleh berdasarkan identifikasi dan analisis permasalahan pembangunan baik secara internal maupun eksternal terhadap suatu keadaan yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPK untuk 5 (lima) tahun mendatang. Adapun informasi yang diperlukan untuk merumuskan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPK merupakan hasil sebagai berikut :

- a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPK.
- b. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- c. Telaah Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
- d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- e. Penentuan Isu - isu Strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie

Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi mempunyai beban tugas yang cukup berat karena bertanggung jawab untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat marginal atau masyarakat yang mengalami pemerataan lapangan kerja bagi angkatan kerja, Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Hal tersebut membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun masyarakat dan dunia usaha disertai adanya lembaga yang kuat dan kewenangan yang jelas untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan.

Secara umum isu-isu strategis berdasarkan Tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie antara lainnya sebagai berikut :

- a. Tingginya Pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia.
- b. Terbatasnya anggaran untuk dapat terlaksananya program dan kegiatan yang telah direncanakan.
- c. Rendahnya SDM yang profesional dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan.
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan Program dan kegiatan.

3.2. Telaah Renstra K/L dan Renstra

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie melaksanakan 3 (tiga) urusan yaitu urusan Tenaga Kerja, urusan Transmigrasi dan urusan Hubungan Industrial yang berada dibawah Kementerian Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Hubungan Industrial.

Arah Kebijakan dan Rencana Strategis Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang tertuang dalam RPJM 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Arah dan Kebijakan Pembangunan Ketenagakerja Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bidang Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kompentensi dan Produktifitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wira usaha baru yang berdaya saing.
- b. Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan Penempatan tenaga kerja baik didalam negeri maupun luar negeri.
- c. Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis.
- d. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum.

Implementasi arah dan Kebijakan Bidang Tenaga Kerja tersebut dilaksanakan melalui program prioritas sebagai berikut :

1. Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
2. Program Penempatan Tenaga Kerja.

2. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)

Arah dan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan Kementrian Tenaga Kerja dan transmigrasi di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) adalah sebagai berikut :

- a. Suatu pengembangan usaha di dalam wilayah kerja, melalui fasilitas pembangunan melalui sentral industri kecil dan menengah.
- b. Pertumbuhan populasi usaha dengan melalui usaha industri.
- c. Adanya peningkatan daya saing produktivitas khusus di kalangan industri.

Implementasi arah dan kebijakan di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dilaksanakan melalui program prioritas sebagai berikut :

- a. Program Hubungan Industrial

3. Bidang Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka menengah diarahkan sebagai alternatif dalam mengurangi kesenjangan wilayah, dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan kecukupan papan, memperkuat pilar ketahan nasional, mendukung pengembangan energi alternatif, mendukung pemerataan investasi secara

berkelanjutan yang pada akhirnya mengurangi kemiskinan dan Pengangguran. Kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan Pembangunan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan potensi sumber daya alam perdesaan terintegrasi dengan pengembangan perkotaan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WTP) atau Lokasi permukiman Transmigrasi (LPT), serta fasilitasi perpindahan dan penetapan penduduk untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan memberikan peluang usaha dikawasan transmigrasi.
2. Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan Pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dalam mendukung pengembangan perdesaan dan ekonomi lokal dan daerah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan daya saing kawasan transmigrasi.

Untuk mencapai arah dan Kebijakan Pembangunan transmigrasi tersebut dilaksanakan melalui program prioritas sebagai berikut :

- a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
- b. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Kedua Program tersebut menjadi fokus Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Pidie dalam melaksanakan Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Pidie.

3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sementara pengertian kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaah rencana tata ruang wilayah bertujuan untuk identifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayananan SKPK, dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPK akan mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan SKPA dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Pembangunan ketransmigrasian dalam bidang wilayah dan tata ruang diarahkan pada pembangunan perdesaan dan ekonomi daerah dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan tanah transmigrasi, penyusunan rencana pembangunan kawasan transmigrasi dan penempatan transmigrasi, pembangunan permukiman di kawasan transmigrasi, fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi dan pengembangan peran serta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi. Selanjutnya untuk kegiatan pengembangan masyarakat transmigrasi meliputi penyusunan rencana teknis pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi, peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi, pengembangan usaha ekonomi di lokasi permukiman, pengembangan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi serta penyerasian lingkungan di kawasan transmigrasi.

Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar yang

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana dan program kegiatan (KRP).

KLHS adalah merupakan instrument proaktif dan sarana pendukung dalam pengambilan keputusan dalam melaksanakan identifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui kajian yang sistematis dan cermat terhadap pilihan – pilihan pembangunan yang tersedia dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara sistematis untuk pengambilan keputusan yang lebih tinggi guna mencegah kesalahan investasi dengan mengingatkan para pengambil keputusan akan adanya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak tahap awal proses pengambilan keputusan. Sehingga tata pengaturan yang lebih baik berkat terbangunnya keterlibatan para pihak dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi. Agar dapat melindungi aset - aset sumber daya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan dengan memberikan fasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagai pemanfaatan sumber daya alam dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.

3.4. Penentuan Isu - isu Strategis

Untuk melaksanakan Kebijakan Pembangunan Tenaga kerja, Transmigrasi dan Hubungan Industrial perlu di tentukan isu - isu strategis sebagai berikut :

1. Bidang Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penentuan isu – isu strategis Pembangunan Tenaga kerja untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Tenaga Kerja adalah :

- a. Peningkatan Kompetensi dan daya saing Tenaga Kerja.
- b. Penyediaan Sarana dan prasarana Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja.
- c. Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
- d. Penurunan angka pertubuhan angkatan kerja.
- e. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja.

2. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)

Isu - isu Strategis Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2023 - 2026 adalah :

- a. Hubungan industrial yang cukup kondusif, tanpa gejolak ketenagakerjaan yang berarti.
- b. Makin dinamisnya perkembangan pelayanan publik (antar kerja) oleh swasta.
- c. Makin terbukanya peluang kerjasama dengan daerah lain.

3. Bidang Transmigrasi

Isu - isu Strategis Pembangunan wilayah Transmigrasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2018 - 2022 adalah :

- a. Mengurangi Kesenjangan wilayah Tertinggal.
- b. Pemerataan Penduduk dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat marginal.

- c. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat Transmigrasi.
- d. Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dalam mendukung Pengembangan Perdesaan/Gampong dan Pengembangan ekonomi daerah.

OoooooOOOoooooo

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode tahun 2023 - 2026. Tujuan pembangunan bidang tenaga kerja, transmigrasi dan hubungan industrial yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Dinas.
2. Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.
3. Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
4. Mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis dan Jamsostek bagi Pekerja.
5. Mewujudkan Pengawasan Ketenagakerjaan yang mandiri (*independen*), netral (*fair treatment*) professional.
6. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
7. Mewujudkan Kawasan Transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi wilayah.

Sasaran Jangka menengah merupakan penjabaran tujuan secara terukur dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai berdasarkan tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie secara garis besar meliputi :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Tertib Administrasi Tata Kelola Keuangan Dinas.
2. Meningkatnya Kualitas / Mutu Pelatihan Kerja.
3. Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
4. Meningkatnya Peran Lembaga Hubungan Industrial dalam Fasilitasi Penyelesaian Hubungan Industrial dan Kepesertaan Jamsostek.
5. Meningkatnya Penerapan Peraturan Perundang – undangan Ketenagakerjaan di tempat kerja.
6. Meningkatnya Permukiman Transmigrasi sebagai tempat tinggal dan usaha yang layak.
7. Meningkatnya Permukiman Transmigrasi yang mandiri dan Kawasan transmigrasi yang berkembang.

oooooOOOooooo

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan adanya strategi sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Adapun strategi yang akan dilaksanakan oleh SKPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie dalam periode 5 (lima) tahun ke depan.

Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie sejalan dengan Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta rencana strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai upaya. Adapun Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Strategi Pembangunan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Untuk terlaksananya Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi..
- b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
- c. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.

2. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) adalah merupakan urusan Pilihan Pemerintah Kabupaten Pidie dengan strategi Rencana Pembangunan Menengah 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Meningkatkan Pembinaan dan Sosialisasi Jamsostek bagi Pekerja dan Pengusaha.
- b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

3. Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi adalah merupakan urusan Pilihan Pemerintah Kabupaten Pidie dengan strategi Rencana Pembangunan Menengah 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- b. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program yang termuat dalam Renstra tahun 2023 - 2026 adalah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie. Pemilihan kegiatan masing-masing program prioritas dilaksanakan berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisikan *outcome* program yaitu manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Atas dasar tersebut, maka program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2023 - 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Hubungan Industrial.

Sehingga perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif diawali dengan menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah selama periode 4 (empat) tahun mendatang, serta menyusun strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan.

Dalam rangka mengimplementasikan program dan kegiatan SKPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie tahun 2023 - 2026 menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur maka perlu adanya indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi. Adapun rincian program dan kegiatan serta indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Rencana Program dan Kegiatan Bidang Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Rencana Program Kegiatan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja jangka menengah tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - c. Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi
- Program Penempatan Tenaga Kerja.
 - a. Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
 - Pelayanan antar Kerja
 - Perluasan Kesempatan Kerja
 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegritas
 - Pengawasan dan Pengendalian LPTKS

2. Rencana Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).

Rencana Program Kegiatan Pembangunan Bidang Hubungan Industrial untuk jangka menengah tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

- Program Hubungan Industrial
 - a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
 - Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

3. Rencana Program dan Kegiatan Bidang Transmigrasi.

Rencana Program Kegiatan Pembangunan Bidang Transmigrasi untuk jangka menengah tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - a. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Penyiapan Hunian Fisik Sosial Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigrasi
 - Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
 - Penyuluhan Transmigrasi
 - Pelayanan Kesehatan Transmigrasi
 - Monitoring dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi
- Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - a. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan
 - Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman
 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie harus dapat diukur dengan jelas agar pembangunan dan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran lebih terarah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Pidie. Untuk maksud tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie menetapkan Indikator Kinerja yang dapat diukur tingkat keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie baik pada akhir tahun anggaran maupun pada akhir masa jabatan Bupati Pidie tahun 2026.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie dalam melaksanakan program dan kegiatan perlu dirumuskan Indikator Kinerja sebagai tolak ukur pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2023 - 2026.

1. Indikator Kinerja Bidang Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Adapun Indikator Kinerja Bidang Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

- a. Persentase (%) Tenaga Kerja yang Memperoleh Pembinaan dan Pelatihan Kerja.
- b. Perluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja.
- c. Persentase (%) Penyelesaian Permasalahan Tenaga Kerja.
- d. Persentase (%) Lembaga Ketenaga Kerjaan yang Memahami dan Melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan.

2. Indikator Kinerja Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).

Adapun Indikator Kinerja Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) adalah sebagai berikut :

- ❖ Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- ❖ Mediasi Kasus PHK pada Perusahaan.
- ❖ Pembentukan Kelembagaan pada Perusahaan.
- ❖ Evaluasi Pengupahan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

3. Indikator Kinerja Bidang Transmigrasi.

Adapun Indikator Kinerja Bidang Transmigrasi adalah sebagai berikut :

- ❖ Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemukiman Transmigrasi.
- ❖ Persentase (%) Peningkatan Kesejahteraan Warga Transmigrasi.
- ❖ Persentase (%) Wilayah Transmigrasi yang Berkembang dan Mandiri.

OooooooooOOOOoooooooo

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis ini adalah dokumen perencanaan Bidang/Urusan Pemerintahan untuk periode 4 (empat) tahun. Renstra ini di susun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Bidang/Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pidie. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie akan menjadi acuan dalam penilaian kinerja Sekretariat Daerah.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta digunakan sebagai bahan Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Pidie.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
Kabupaten Pidie

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tenaga Kerja																	
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		50.02	44,030	46.232	50.855	58,483	70,180	0	41.76	46.28			0	110.709	109.885		
	Tingkat partisipasi angkatan kerja		68.94	66.27	68.26	69.58	70.19	70.25	62.04	63.37	65.55			106.818	107.717	106.148		
	Rasio Penduduk Mencari Pekerjaan		22.53	39.78	43.94	48.11	52.27		0	18.77	17.02			0	234.097	282.667		
	Hubungan Industrial																	
	Angka sengketa pengusaha-pekerja dan penyelesaian per tahun		22	3,300	3,630	3,993	4,392	5,271	0	0	0			0	0	0		
	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah		14	66	68	69	70	72	0	0	0			0	0	0		

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Pidie

No	Uraian	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,214,080,000	965,750,242	639,117,839	639,117,839		1,093,506,625	938,011,040	563,997,432	563,997,432	0	90	97	88	88	0	3,458,065,920	3,159,512,529
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	500,000,000	4,058,794,000	200,000,000	350,189,052	1,300,000,000	2,042,304,000	4,058,258,000	200,000,000	350,189,052	0	408	100	100	100	0	5,368,983,052	6,650,751,052
3	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	900,000,000	455,600,000	26,905,000	0	0	199,900,000	100,000,000	26,605,000	0	0	22	22	99	-	0	1,382,505,000	326,505,000
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	0	0	0	39,999,655	50,000,000	0	0	0	39,999,655	0	-	-	-	100	0	49,999,655	39,999,655
5	Program Hubungan Industrial	220,000,000	275,630,000	100,000,000	390,737,023	216,000,000	189,000,000	171,666,000	100,000,000	390,737,023	0	86	62	100	100	0	1,029,567,023	851,403,023
6	Program Transmigrasi lokal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0
7	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	0	0	0	0	148,500,000	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	29,700,000	0
8	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	0	0	0	0	140,000,000	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	28,000,000	0
9	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	659,328,295	215,000,000	411,306,319	467,995,791	150,000,000	533,430,600	213,969,374	409,262,248	427,844,216	0	81	100	100	91	0	1,783,630,405	1,584,506,438

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Kondisi Awal Tahun 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-			
					2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pemerintahan yang Baik dalam Proses Penyusunan Rencana Ketenagakerjaan secara Sistematis	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Kualitas Layanan Publik	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks) dan Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Standar		70,00	77,00	80,00	85,00
2	Meningkatkan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari kerja Berdasarkan kalster Kompetensi	Pencari Kerja maupun Masyarakat pada Umumnya	Meningkatkan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan		100%	100%	100%	100%
3	Terbinanya Hubungan Baik antara Pekerja dan Perusahaan	Tersedianya Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dalam Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial		100%	100%	100%	100%
4	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tersedianya Penguatan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Kemandirian Suatu Pemukiman	Terlaksananya Penguatan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Kemandirian Suatu Pemukiman		100%	100%	100%	100%

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	Terwujudnya Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Maju dan Sejahtera		
MISI I	Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja dan Peningkatan Taraf Hidup Warga Transmigrasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pemerintahan yang Baik dalam Proses Penyusunan Rencana Ketenagakerjaan secara Sistematis	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Kualitas Layanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Meningkatkan Diseminasi Informasi melalui Pendayagunaan Media Informasi Guna Menunjang Transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Disiplin Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

<p>Meningkatkan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari kerja Berdasarkan kalster Kompetensi</p>	<p>Pencari Kerja maupun Masyarakat pada Umumnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja yang Terampil dan Ahli di Bidangnya 2. Memperoleh Pekerjaan yang sesuai dengan Bakat, Minat dan Kemampuannya 3. Untuk Pemberi Kerja dapat Memperoleh Tenaga Kerja yang Sesuai dengan Kebutuhannya 	<p>Peningkatan Tenaga Kerja dengan Memperoleh Pekerjaan dengan Bakat yang di Milikinya</p>
<p>Terbinanya Hubungan Baik antara Pekerja dan Perusahaan</p>	<p>Tersedianya Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. terselesainya perselisihan antara Pekerja dengan Perusahaan 2. Terjaminnya Para Pekerja di dalam Perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbinanya Hubungan antara Pekerja dengan Perusahaan 2. Terjalannya Hubungan yang Baik antara Pekerja dan Perusahaan
<p>Terlaksananya Pengembangan Kawasan Transmigrasi</p>	<p>Tersedianya Penguatan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Kemandirian Suatu Pemukiman</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi 2. Meningkatnya Permukiman Transmigrasi sebagai tempat tinggal dan usaha yang layak 3. Meningkatnya Permukiman Transmigrasi yang mandiri dan Kawasan transmigrasi yang berkembang 	<p>Pengembangan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi</p>

Tabel T-C. 27
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pidie Tahun 2022-2026

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
						target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0		
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta profesionalitas pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Layanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	92%	100%	3,103,245,655	100%	3,258,407,938.00	100%	3,421,328,335	100%	3,592,394,752	100%	13,260,176,680	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	6 Dokumen	15,000,000	6 Dokumen	15,000,000	6 Dokumen	15,000,000	6 Dokumen	15,000,000	24 Dokumen	60,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	6,000,000	3 Dokumen	6,000,000	3 Dokumen	6,000,000	3 Dokumen	6,000,000	12 Dokumen	24,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	3 Dokumen	2,000,000	3 Dokumen	2,000,000	3 Dokumen	2,000,000	3 Dokumen	2,000,000	12 Dokumen	8,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	4 Dokumen	2,000,000	4 Dokumen	2,000,000	4 Dokumen	2,000,000	4 Dokumen	2,000,000	16 Dokumen	8,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3 Laporan	5,000,000	3 Laporan	5,000,000	3 Laporan	5,000,000	3 Laporan	5,000,000	12 Laporan	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2,204,205,570	2 Dokumen	2,299,757,986	2 Dokumen	2,395,310,402	2 Dokumen	2,490,862,818	8 Dokumen	9,390,136,776	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	23 Orang/Bulan	2,197,705,570	24 Orang/Bulan	2,293,257,986.00	25 Orang/Bulan	2,388,810,402.00	26 Orang/Bulan	2,484,362,818.00	98 Orang/Bulan	9,364,136,776	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Bulan	58 Laporan	6,500,000	58 Laporan	6,500,000	58 Laporan	6,500,000	58 Laporan	6,500,000	232 Laporan	26,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Paket	2 Dokumen	27,600,000	2 Dokumen	28,400,000	2 Dokumen	29,200,000	2 Dokumen	30,000,000	8 Dokumen	40,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	3 Unit	10,000,000	3 Unit	10,000,000	3 Unit	10,000,000	3 Unit	10,000,000	12 Unit	40,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22 Paket	22 Paket	17,600,000	23 Paket	18,400,000	24 Paket	19,200,000	25 Paket	20,000,000	94 Paket	75,200,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	8 Dokumen	196,440,085	8 Dokumen	218,500,000	8 Dokumen	251,817,933	8 Dokumen	288,500,000	32 Dokumen	955,258,018	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	2,500,000	1 Paket	2,500,000	1 Paket	2,500,000	1 Paket	2,500,000	4 Paket	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
						target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2,000,000	1 Paket	2,000,000	1 Paket	2,000,000	1 Paket	2,000,000	4 Paket	8,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2,000,000	1 Paket	2,000,000	1 Paket	2,000,000	1 Paket	2,000,000	4 Paket	8,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25,000,000	1 Paket	25,000,000	1 Paket	25,000,000	1 Paket	25,000,000	4 Paket	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,000,000	4 Paket	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	2,000,000	3 Dokumen	2,000,000	3 Dokumen	2,000,000	3 Dokumen	2,000,000	12 Dokumen	8,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	157,940,085	35 Laporan	180,000,000	40 Laporan	213,317,933	45 Laporan	250,000,000	150 Laporan	801,258,018	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	30,031,937	4 Paket	60,031,937	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	30,031,937	4 Paket	60,031,937	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	500,000,000	4 Dokumen	500,000,000	4 Dokumen	500,000,000	4 Dokumen	507,999,997	16 Dokumen	2,007,999,997	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	5,000,000	8 Laporan	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	36 Laporan	120,000,000	36 Laporan	120,000,000	36 Laporan	120,000,000	36 Laporan	127,999,997	144 Laporan	487,999,997	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	2 Laporan	25,000,000	2 Laporan	25,000,000	2 Laporan	25,000,000	2 Laporan	25,000,000	8 Laporan	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Laporan	350,000,000	12 Laporan	350,000,000	12 Laporan	350,000,000	12 Laporan	350,000,000	48 Laporan	1,400,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	2Dokumen	150,000,000	2Dokumen	186,749,952	2Dokumen	220,000,000	2Dokumen	230,000,000	28 Dokumen	786,749,952	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	100,000,000	6 Unit	136,749,952	8 Unit	170,000,000	10 Unit	180,000,000	28 Unit	586,749,952	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
						target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	50,000,000	8 Unit	50,000,000	8 Unit	50,000,000	8 Unit	50,000,000	32 Unit	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2	Meningkatkan Tenaga Kerja yang Produktif dan Inovatif serta Dapat Meningkatkan Ekonomi Masyarakat pada Umumnya	Menyediakan Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha bagi Tenaga Kerja Penganggur dan Setengah Penganggur di Pedesaan maupun Perkotaan serta Membedardayakan Ekonomi Masyarakat dan Mempercepat Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	7 Pelatihan	4 Dokumen	1,200,000,000	4 Dokumen	1,320,000,000	4 Dokumen	1,452,000,000	4 Dokumen	1,597,200,000	16 Dokumen	5,569,200,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Kegiatan: Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	7 Pelatihan	210 Org & 30 Unit	1,160,000,000	120 Org & 25 Unit	1,290,000,000	140 Org & 30 Unit	1,420,000,000	160 Org & 35 Unit	1,564,000,000	1020 Org & 57 Unit	5,434,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	7 Pelatihan	210 Orang	1,100,000,000	240	1,270,000,000	270 Orang	1,400,000,000	300 Orang	1,550,000,000	1020 Orang	5,320,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	-	30 Unit	60,000,000	10 Unit	20,000,000	10 Unit	20,000,000	7 Unit	14,000,000	57 Unit	114,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Kegiatan: Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	10 Lembaga	25,000,000	15 Lembaga	15,000,000	16 Lembaga	16,000,000	17 Lembaga	16,600,000	58 Lembaga	72,600,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	-	10 Lembaga	25,000,000	15 Lembaga	15,000,000	16 Lembaga	16,000,000	17 Lembaga	16,600,000	58 Lembaga	72,600,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Kegiatan: Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	-	10 Perizinan	15,000,000	15 Perizinan	15,000,000	16 Perizinan	16,000,000	17 Perizinan	16,600,000	58 Perizinan	62,600,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	-	10 Perizinan	15,000,000	15 Perizinan	15,000,000	16 Perizinan	16,000,000	17 Perizinan	16,600,000	58 Perizinan	62,600,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
3	Pemberdayaan Perluasan Kesempatan Kerja untuk Meningkatkan Pelayanan Antarkerja	Tersedianya Tenaga Kerja yang Diberdayakan melalui Perluasan Kesempatan Kerja serta Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antarkerja yang Mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan Lainnya untuk Peningkatan Kompetensi	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja		57,763,085		63,539,393		69,893,333		80,377,332		395,573,143	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
			Kegiatan: Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota		5 Dokumen	47,763,085	5 Dokumen	48,539,393	5 Dokumen	52,893,333	5 Dokumen	60,377,332	20 Dokumen	333,573,143	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		20 Orang	25,000,000	25 Orang	25,000,000	30 Orang	28,000,000	35 Orang	33,377,332	110 Orang	111,377,332	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
						target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0		
			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	-	30 Orang	22,763,085	35 Orang	23,539,393	40 Orang	24,893,333	45 Orang	27,000,000	150 Orang	98,195,811	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Kegiatan: Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	17,000,000	2 Dokumen	20,000,000	8 Dokumen	62,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Bertaku	-	15 Lembaga	10,000,000	20 Lembaga	15,000,000	25 Lembaga	17,000,000	30 Lembaga	20,000,000	90 Lembaga	62,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
4	Meningkatkan Proses Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berkurangnya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan-Perusahaan	Program Hubungan Industrial	Jumlah Kegiatan Hubungan Industrial	10 Bulan	3 Dokumen	80,410,938	3 Dokumen	88,452,032	3 Dokumen	97,297,235	3 Dokumen	100,216,152	12 Dokumen	366,376,357	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Kegiatan: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Bulan	50 Laporan	80,410,938	60 Laporan	88,452,032	70 Laporan	97,297,235	80 Laporan	100,216,152	260 Laporan	366,376,357	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Tripartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta pengupahan	10 Bulan	50 Laporan	80,410,938	60 Laporan	88,452,032	70 Laporan	97,297,235	80 Laporan	100,216,152	260 Laporan	366,376,357	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
5	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Kawasan Transmigrasi pada Umumnya dan Warga Transmigrasi pada Khususnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja sama Pembangunan Transmigrasi serta Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Pembangunan Kawasan Transmigrasi		4 Dokumen	150,000,000	4 Dokumen	165,000,000	4 Dokumen	181,500,000	4 Dokumen	217,800,000	32 Dokumen	714,300,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		4 Dokumen	150,000,000	4 Dokumen	165,000,000	4 Dokumen	181,500,000	4 Dokumen	217,800,000	32 Dokumen	714,300,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	3 Laporan	10,000,000	4 Laporan	25,000,000	5 Laporan	30,000,000	6 Laporan	35,000,000	18 Laporan	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
						target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0	target	Rp0		
			Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	-	2 Dok	110,000,000	2 Dok	110,000,000	2 Dok	111,500,000	2 Dok	132,800,000	2 Dok	464,300,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Cek Kesehatan Calon Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	-	35 KK	10,000,000	35 KK	10,000,000	35 KK	15,000,000	35 KK	20,000,000	35 KK	55,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	-	1 Lokasi	20,000,000	1 Lokasi	20,000,000	1 Lokasi	25,000,000	1 Lokasi	30,000,000	1 Lokasi	95,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
6	Terlaksananya Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan, Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman serta Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	2 Dokumen	135,000,000	2 Dokumen	148,500,000	2 Dokumen	163,350,000	2 Dokumen	196,020,000	8 Dokumen	642,870,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Kegiatan: Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	1 Dokumen	2 Dokumen	135,000,000	2 Dokumen	148,500,000	2 Dokumen	163,350,000	2 Dokumen	196,020,000	8 Dokumen	642,870,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	12 Bulan	100 KK	80,000,000	100 KK	86,500,000	100 KK	96,000,000	100 KK	116,000,000	100 KK	378,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan		2 Satuan Permukiman	55,000,000	2 Satuan Permukiman	62,000,000	2 Satuan Permukiman	67,350,000	2 Satuan Permukiman	80,020,000	2 Satuan Permukiman	264,370,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
JUMLAH TOTAL RENCANA PENDANAAN INDIKATIF PER TAHUN							4,726,419,678.00	5,043,899,363.00	5,385,368,903.00	5,784,008,236.00	20,948,496,180.00						

Sigli, Mei 2022
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN PIDIE**

H. ISNAINI, ST, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19761230 200112 1 002

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tenaga Kerja						
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	6	2	2	2	2	6
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	283	69.98	70.12	71.18	71.82	283
	Rasio Penduduk Mencari Pekerjaan	249	57.66	61.43	64.65	65.13	249
	Hubungan Industrial						
	Angka sengketa pengusaha-pekerja dan penyelesaian per tahun	22	4	5	6	7	22
	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	14	2	3	4	5	14
	Transmigrasi						
	Persentase Transmigrasi Swakarsa	168	42	42	42	42	168

TABEL EVALUASI
HASIL ANALISIS TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) KABUPATEN PIDIE TAHUN 2017-2022
PER 31 DESEMBER 2021

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Daerah					Realisasi Kinerja Daerah					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tenaga Kerja												
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	42,748	44,030	46,232	50,855	58,483	70,180	0	41.76	46.28			
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	64.34	66.27	68.26	69.58	70.19	70.25	62.04	63.37	65.55			
	Rasio Penduduk Mencari Pekerjaan		39.78	43.94	48.11	52.27		0	18.77	17.02			
	Hubungan Industrial												
	Angka sengketa pengusaha-pekerja dan penyelesaian per tahun	3,000	3,300	3,630	3,993	4,392	5,271	0	0	0			
	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	65	66	68	69	70	72	0	0	0			

Sigli, Mei 2022
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
 TRANSMIGRASI KABUPATEN PIDIE**

H. ISNAINI, ST, M.Si
 PEMBINA TK.I
 NIP. 19761230 200112 1 002

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Pidie**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatkan Proses Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Berkurangnya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan pada Perusahaan-Perusahaan	80 %	75 %		70 %		65 %		60 %		0 %		60 %			
Meningkatkan Proses Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Berkurangnya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan pada Perusahaan-Perusahaan	80 %	75 %		70 %		65 %		60 %		0 %		60 %			
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Peraturan Pemerintah	0 %	40 %	80,410,838	42 %	88,452,032	44 %	97,297,235	46 %	100,216,152	0 %	0	46 %	0		
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	1 Laporan	80,410,938	1 Laporan	88,452,032	1 Laporan	97,297,235	1 Laporan	100,216,152	0 Laporan	0	4 Laporan	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
Pemberdayaan Perluasan Kesempatan Kerja untuk Meningkatkan Pelayanan Antarkerja				Tersedianya Tenaga Kerja yang Diberdayakan melalui Perluasan Kesempatan Kerja serta Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antarkerja yang Mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan Lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	70 %	71 %		72 %		73 %		74 %		0 %		74 %			
Pemberdayaan Perluasan Kesempatan Kerja untuk Meningkatkan Pelayanan Antarkerja				Tersedianya Tenaga Kerja yang Diberdayakan melalui Perluasan Kesempatan Kerja serta Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antarkerja yang Mendapatkan Pelatihan melalui Bimtek dan Lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	70 %	71 %		72 %		73 %		74 %		0 %		74 %			
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0 %	49 %	57,763,085	50 %	63,539,393	50.5 %	69,893,333	51 %	80,377,332	0 %	0	51 %	0		
		2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	47,763,085	1 Dokumen	48,539,393	1 Dokumen	52,893,333	1 Dokumen	60,377,332	0 Dokumen	0	4 Dokumen	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	17,000,000	1 Dokumen	20,000,000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Pidie**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatkan Tenaga Kerja yang Produktif dan Inovatif serta Dapat Meningkatkan Ekonomi Masyarakat pada Umumnya				Menyediakan Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha bagi Tenaga Kerja Penganggur dan Setengah Penganggur di Pedesaan maupun Perkotaan serta Membedardayakan Ekonomi Masyarakat dan Mempercepat Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	80 %	81 %		82 %		83 %		84 %		0 %		84 %			
Meningkatkan Tenaga Kerja yang Produktif dan Inovatif serta Dapat Meningkatkan Ekonomi Masyarakat pada Umumnya				Menyediakan Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha bagi Tenaga Kerja Penganggur dan Setengah Penganggur di Pedesaan maupun Perkotaan serta Membedardayakan Ekonomi Masyarakat dan Mempercepat Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	80 %	81 %		82 %		83 %		84 %		0 %		84 %			
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Terlatih yang Mendapat Sertifikat Kompetensi	0 %	67 %	1,300,000,000	68 %	1,320,000,000	69 %	1,452,000,000	70 %	1,597,200,000	0 %	0	70 %	0		
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	0 Orang	210 Orang	1,160,000,000	240 Orang	1,290,000,000	270 Orang	1,420,000,000	300 Orang	1,564,000,000	0 Orang	0	300 Orang	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	0 Lembaga	10 Lembaga	25,000,000	15 Lembaga	15,000,000	16 Lembaga	16,000,000	17 Lembaga	16,600,000	0 Lembaga	0	58 Lembaga	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	0 Perizinan	10 Perizinan	15,000,000	15 Perizinan	15,000,000	16 Perizinan	16,000,000	17 Perizinan	16,600,000	0 Perizinan	0	58 Perizinan	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Kawasan Transmigrasi pada Umumnya dan Warga Transmigrasi pada Khususnya				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja sama Pembangunan Transmigrasi serta Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	89 %	90 %		91 %		92 %		93 %		0 %		93 %			
Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Kawasan Transmigrasi pada Umumnya dan Warga Transmigrasi pada Khususnya				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja sama Pembangunan Transmigrasi serta Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	83 %	90 %		91 %		92 %		93 %		0 %		93 %			
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Lokasi transmigrasi yang di fasilitasi pembangunannya	0 %	50 %	150,000,000	50 %	165,000,000	50 %	181,500,000	50 %	217,800,000	0 %	0	50 %	0		
		3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	165,000,000	1 Dokumen	181,500,000	1 Dokumen	217,800,000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Pidie**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Terlaksananya Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan, Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman serta Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	85 %	86 %		87 %		88 %		89 %		0 %		89 %			
Terlaksananya Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan, Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman serta Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	85 %	86 %		87 %		88 %		89 %		0 %		89 %			
		3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Lokasi Transmigrasi Yang Mandiri dan Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	0 %	50 %	135,000,000	50 %	148,500,000	50 %	163,350,000	50 %	196,020,000	0 %	0	50 %	0		
		3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Terlaksananya Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	0 Dokumen	1 Dokumen	135,000,000	1 Dokumen	148,500,000	1 Dokumen	163,350,000	1 Dokumen	196,020,000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta profesionalitas pelayanan publik yang berkualitas				Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Layanan Publik	93 %	94 %		95 %		96 %		97 %		0 %		97 %			
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta profesionalitas pelayanan publik yang berkualitas				Meningkatnya transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Kualitas Layanan Publik	93 %	94 %		95 %		96 %		97 %		0 %		97 %			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	0 %	85 %	3,103,245,655	85 %	3,258,407,938	85 %	3,421,328,335	85 %	3,592,394,752	0 %	0	85 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	0 Dokumen	6 Dokumen	15,000,000	6 Dokumen	15,000,000	6 Dokumen	15,000,000	6 Dokumen	15,000,000	0 Dokumen	0	24 Dokumen	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Dokumen	2 Dokumen	2,204,205,570	2 Dokumen	2,299,757,986	2 Dokumen	2,395,310,402	2 Dokumen	2,490,862,818	0 Dokumen	0	8 Dokumen	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Dokumen	2 Dokumen	27,600,000	2 Dokumen	28,400,000	2 Dokumen	29,200,000	2 Dokumen	30,000,000	0 Dokumen	0	8 Dokumen	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Paket	7 Paket	196,440,085	7 Paket	218,500,000	7 Paket	251,817,933	7 Paket	288,500,000	0 Paket	0	28 Paket	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	0 Paket	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	30,031,937	0 Paket	0	4 Paket	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Dokumen	4 Dokumen	500,000,000	4 Dokumen	500,000,000	4 Dokumen	500,000,000	4 Dokumen	507,999,997	0 Dokumen	0	16 Dokumen	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit	12 Unit	150,000,000	14 Unit	186,749,952	16 Unit	220,000,000	18 Unit	230,000,000	0 Unit	0	60 Unit	0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	